

***COLLECTIVE ACTION PARTAI MASYUMI DALAM UPAYA
MENDIRIKAN NEGARA ISLAM (1945-1960 M)***



Oleh :

J A I N U D D I N
NIM. 1420510031

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Pada Program Studi Agama dan Filsafat Konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam

**PASCASARJANA
UIN SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Jainuddin**
NIM : 1420510031
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, April 2016

Saya yang menyatakan,



Jainuddin

NIM: 1420510031

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Jainuddin**
NIM : 1420510031
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, April 2016

Saya yang menyatakan,



Jainuddin

NIM: 1420510031



PENGESAHAN

Tesis berjudul : *COLLECTIVE ACTION* PARTAI MASYUMI DALAM UPAYA
MENDIRIKAN NEGARA ISLAM (1945 – 1960 M.)

Nama : Jainuddin, S. Pd.I.

NIM : 1420510031

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Agama dan Filsafat

Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam

Tanggal Ujian : 16 Juni 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Humaniora (M.Hum.)

Yogyakarta, 30 Juni 2016

Direktur



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207-199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : *COLLECTIVE ACTION* PARTAI MASYUMI DALAM UPAYA
MENDIRIKAN NEGARA ISLAM (1945 – 1960 M.)

Nama : Jainuddin, S. Pd.I.

NIM : 1420510031

Program Studi : Agama dan Filsafat

Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Hj. Marhumah, M. Pd.

()

Pembimbing/Penguji : Dr. Subaidi, M. Si.

()

Penguji : Prof. Dr. M. Abdul Karim, MA. MA.

()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 16 Juni 2016

Waktu : 11.00 wib.

Hasil/Nilai : 90.33/A

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

COLLEKTIVE ACTION PARTAI MASYUMI DALAM UPAYA MENDIRIKAN NEGARA ISLAM (1945-1960)

Yang ditulis oleh:

Nama : **Jainuddin**
NIM : 1420510031
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelas Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 27 April 2016
Pembimbing


Dr. Subaidi, M.Si

Abstrak

Upaya mewujudkan Negara Islam yang diperjuangkan oleh kalangan Islam yang mana dimulai dari masa kebangkitan nasional, kemudian berlanjut pada sidang BPUPK yang menghasilkan Piagam Jakarta sebagai hasil kompromi antara golongan Islam dan Nasionalis. Perdebatan dalam Majelis Konstituante merupakan upaya tindakan politik yang dilakukan oleh Partai Masyumi secara konstitusional untuk mewujudkan Islam sebagai dasar negara. Negara Islam yang diperjuangkan oleh Partai Masyumi sangat berbeda dengan yang diperjuangkan oleh Kartosuwiryo, Teuku Daud Beureuh, dan Kahar Muzakar. Perbedaan tersebut terdapat dari tindakan maupun aksi yang dilakukan untuk mencapainya. Partai Masyumi melakukan itu dengan terlibat secara langsung dalam proses pemerintahan, sementara Kartosuwiryo, Daud Beureuh, dan Kahar Muzakar melakukan dengan tindakan represif. Berdasarkan fakta sejarah ini maka timbulah pertanyaan besar apa alasan yang mendasari tindakan politik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam (Masyumi) untuk mendirikan Negara Islam tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tindakan politik Partai Masyumi dalam upaya memperjuangkan Negara Islam secara konstitusional, disertai dengan analisis dampak yang di timbulkannya.

Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu *funksionalisme* dan *collective action* dengan menggunakan pendekatan sejarah. Penggunaan kedua teori tersebut untuk melihat tindakan politik yang dilakukan oleh Partai Masyumi sesuai dengan orientasi politik dan sistem nilai serta dampak yang ditimbulkannya. Sebagaimana yang dirumuskan oleh Charles Tilly bahwa *collective action* merupakan teori yang mengkaji peristiwa sosial politik yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. *Collective action* mengandung lima komponen besar yaitu; Kepentingan bersama, organisasi, mobilisasi, kesempatan dan tindakan kolektif.

Hasil penelitian ini adalah 1) Tindakan bersama Partai Masyumi tidak terlepas dari sistem nilai yang dibangun berdasarkan *ijtihad* terhadap teks al-Qur'an dan as-Sunah serta orientasi politik yang bertujuan untuk mewujudkan Islam sebagai dasar negara. Partai Masyumi merupakan eksperimen kelompok modernis mengawinkan nilai-nilai Islam dengan demokrasi modern Barat. 2) Tindakan politik seperti semangat nasionalisme dan dukungan pada Indonesia sebagai negara-bangsa serta kemampuan para tokoh Masyumi yang memiliki sikap yang terbuka dan mampu menjalin kerja sama dengan kelompok lain yang berbeda ideologi dan agama. 3) Negara Islam yang diperjuangkan oleh Masyumi adalah Negara Islam yang berbentuk demokrasi atau Republik. Upaya memperjuangkan Negara Islam menjadi sesuatu yang wajib oleh partai mengingat umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas. Walaupun Islam di anggap sebagai mayoritas bukan berarti Negara Islam yang diperjuangkan oleh Masyumi mengabaikan hak-hak bagi warganegara yang beragama lain seperti Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha.

Kata kunci: Kollektive Action, Masyumi, Negara Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan kata-kata asing dalam tesis ini berpedoman pada kaidah transliterasi Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	ba'	B	be
	ta'	T	te
	S a'	S	es (dengan titik diatas)
	Jim	J	je
	H{a	h{	ha (dengan titik dibawah)
	kho'	Kh	ka dan ha
	dal	D	de
	Z{al	z}	zet (dengan titik diatas)
	ra'	R	er
	Z ai	Z	zet
	Sin	s	es
	Syin	sy	es dan ye
	s{ad	S}	es (dengan titik dibawah)
	d}ad	d}	de (dengan titik dibawah)
	t}a'	t}	te (dengan titik dibawah)
	z{a'	z}	zet (dengan titik dibawah)
	'ain	'	koma terbaik diatas

	Gain	G	ge
	fa'	F	ef
	qof	Q	qi
	Kaf	K	ka
	lam	L	el
	Mim	M	em
	nun	N	en
	Wawu	W	we
	ha'	H	ha
	hamzah	'	apostrof
	ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	ditulis ditulis	muta' aqqidin 'iddah
--------	--------------------	-------------------------

C. Ta'Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizayah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserab ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

Bila diikuti dengan kata sedang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الاولياء	Ditulis	karamah al-auliya<<>'
----------------	---------	-----------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasroh, dan dammah ditulis t.

	Ditulis	zaka>tul fit}ri
--	---------	-----------------

D. Vokal Pendek

_____	kasrah	i
_____	fathah	a
_____	dammah	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	Ja>hliyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a>
kasroh + ya' mati	ditulis	i>
كريم	ditulis	kari>m
dammah + wawu mati	ditulis	u
	Ditulis	furu>d

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
	Ditulis	qaulum

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

	ditulis	a'antum
	ditulis	u'idat
	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qomariyah

القياس	Ditulis	al-quru'a>n
	Ditulis	al-Qiya>s

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan mengandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

	ditulis	as-Sama>'
	ditulis	asy-Syams

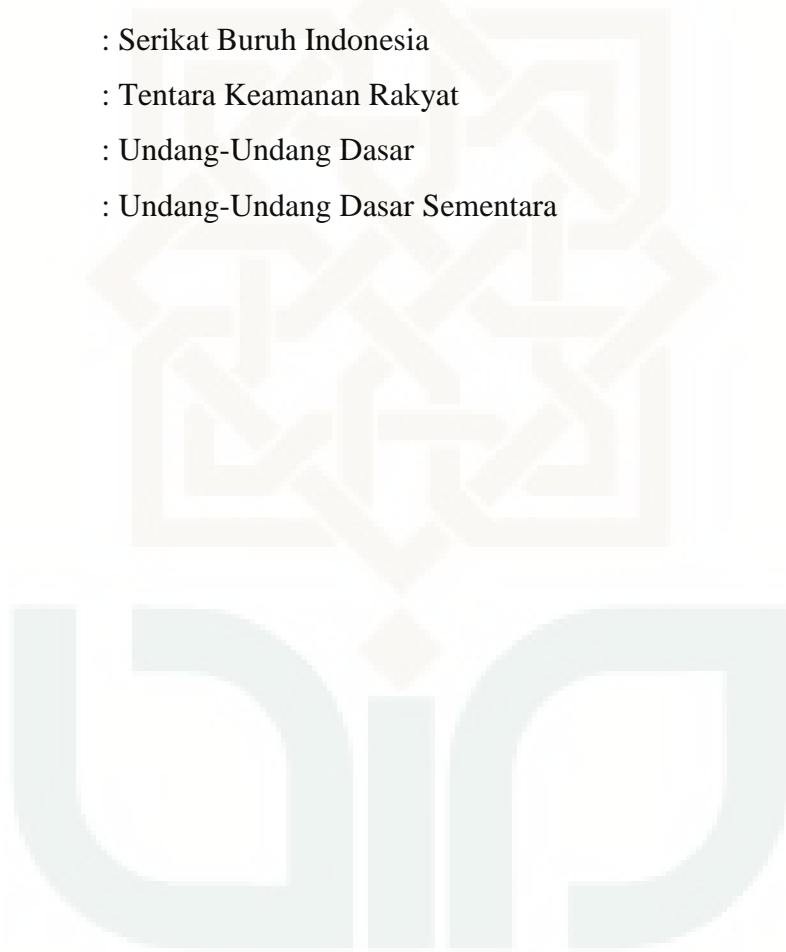
1. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل السنة	ditulis	Z}awi> al-furu>d
	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR SINGKATAN

BKR	: Badan Keamanan Rakyat
BPUPK	: Badan Perumus Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
DI	: Darul Islam
DPP	: Dewan Pimpinan Partai
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPR-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
GAPRA	: Gerakan Angkatan Perang Ratul Adil
GBN	: Gerakan Benteng Nasional
GPII	: Gerakan Pemuda Islam Indonesia
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
KUII	: Kongres Ummat Islam Indonesia
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
MIAI	: Majelis Islam A'laa Indonesia
MK	: Majelis Konstituante
MSA	: Mutual Security Agency
NII	: Negara Islam Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama
Parkindo	: Partai Kristen Indonesia
PB	: Partai Buruh
Permesta	: Perjuangan Semesta
Persis	: Persatuan Sarikat Islam
Perti	: Persatuan Tarbiyah Islamiyah
PII	: Partai Islam Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PM	: Partai Murba
PNI	: Partai Nasionalis Indonesia

PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PRRI	: Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia
PSII	: Partai Sarikat Islam Indonesia
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
PUSA	: Persatuan Ulama-ulama Seluruh Aceh
RIS	: Republik Indonesia Serikat
SBII	: Serikat Buruh Islam Indonesia
SBI	: Serikat Buruh Indonesia
TKR	: Tentara Keamanan Rakyat
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUDS	: Undang-Undang Dasar Sementara



MOTO HIDUP

**Berpikir positif dan berusaha menjadi pribadi yang
bermanfaat bagi orang lain.**

**Berusaha melakukan kebaikan dan berusaha menjauhkan
diri dari segala keburukan.**



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Allah swt yang telah diberikan kepada segenap makhluk-Nya. Salam dan shalawat atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad saw yang membawa ummat manusia dari zaman kegelapan ke cahaya terang benderang. Tesis yang ditulis oleh penulis yang berjudul: ”*Collective Action* Partai Masyumi Dalam Upaya Memeperjuangkan Negara Islam; 1945-1960 M)” mampu diselesaikan tepat pada waktunya meskipun terdapat berbagai kekurangan baik teknik penulisan maupun ketajaman analisis yang dilakukan oleh penulis. Meskipun demikian, tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada;

1. Prof. Dr. Musa Asy'ari, M.A. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2010-2014
2. Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, M.A., P.hD Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2014-2015
3. Prof. Dr. Machasin, M.A. selaku Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015-2016.
4. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.hD selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang baru saja dilantik.
5. Prof. Dr. Khoiruddin, M.A. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2010-2014
6. Prof. Norhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

7. Prof. Dr. M. Abdul Karim, M.A., M.A. selaku penguji tesis ini, yang telah banyak memberikan masukan dan kritikan yang mana bimbingan dan arahan bapak yang melebihi tugasnya sebagai dosen penguji telah membimbing saya dalam perbaikan tesis ini yang mana ada bagian tertentu dalam tesis ini yang di tambah guna melengkapi berbagai kekurangan yang ada.
8. Dr. Subaidi, M.Si., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, dorongan untuk terus mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini meskipun di tengah-tengah kesibukannya dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen dan alhamdulillah tulisan ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya.
9. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak memberikan pencerahan kepada penulis selama kuliah di Program Pascasarjana. Semoga amal-amal mereka menjadi berkah dan mendapatkan ridha ilahi.
10. Para pegawai perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dan Program Pascasarjana yang telah memberikan pelayanan dan pinjaman buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
11. Ayahanda H. Tajudin dan Ibunda Imran tercinta serta Abubakar dan Aminah selaku mertua tersayang yang telah banyak memberikan do'a dan bantuan yang tulus, berkat perjuangan keduanya penulis dimudahkan dalam proses penyelesaian studi di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Istri tercinta Sarifah, S.Pd.I yang selalu memberikan dorongan serta motivasi yang membangun sehingga studi ini bisa diselesaikan, ananda tercinta Fawaid

Izzuddin yang lucu dan cerdas semoga menjadi hafidz al-Qur'an di masa yang akan datang.

13. Abang ku Jufriadin beserta istrinya Rizki yang telah banyak memberikan motivasi dan bantuan materi, adinda Nurmalasari yang Cerewet, Nur Ahmadin yang kreatif dan inovatif, serta keponakan Nurin Zahratunnisa yang imut dan Humaidi yang lucu dan nakal mudah-mudahan menjadi anak yang pintar dan shaleh yang berbakti kepada kedua orang tuanya.

14. Saudara-saudara seperjuangan di Pascasarjana Konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam kelas Reguler: Abdurrahman,S.Pd.I, Marsus, S.Hum, Juma, S.Hum, Bambang Hadiyanto, S.Hum, Syamsul Rahmi, S.Hum, Sucipto, S.Hum, Lisa Aisyiah Rasyid, S.H.I, Syafira Sulistiana, S.Th.I, Ridwan Bagus Dwi Saputra, S.Hum, Azis, S.Hum, Ana Roida, S.Hum, Sidik Fauzi, S.Hum, Rusdiyanto, S.Hum, Muhammad Iqbal, S.Hum, Tahanil Fawaid, S.Hum, Farida Yuliana Safitri, S.Pd. semoga kebersamaan ini senantiasa terjaga walau kita dalam keadaan berjauhan

Sebagai akhir dari pengantar tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada para sahabat-sahabat yang tidak penulis sempat sebutkan namanya satu-satu dalam tulisan ini disebabkan kasih kalian yang begitu mendalam dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi kalian. Amin.

Yogyakarta, Juli 2016

Penulis,



Jainuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
PERSETUJUAN TEAM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN	xii
MOTO HIDUP.....	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan	13
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Kerangka Teoritik	18
F. Metodologi Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	27

BAB II SISTEM NILAI DAN ORIENTASI POLITIK	
PARTAI MASYUMI	29
A. Sistem Nilai.....	29
B. Orientasi Politik Partai Masyumi.....	37
C. Tujuan Partai Masyumi.....	53
BAB III TINDAKAN POLITIK MASYUMI SEBAGAI PINTU	
PERUBAHAN DAN KEMANDEKAN	62
A. Tindakan Politik.....	62
1. Kritis Terhadap Pemerintahan.....	62
2. Tindakan Oposisi.....	70
3. Resolusi.....	78
4. Otoritas Kharismatik Ulama.....	86
5. Melibatkan Diri Dalam Proses Pemerintahan.....	91
6. Aktivitas Diplomatik.....	109
B. Dampak Tindakan Politik Dalam Sistem Budaya.....	119
C. Dampak Tindakan Politik Dalam Sistem Politik.....	129
BAB IV ANALISIS COLLEKTIVE ACTION DALAM MENDIRIKAN	
NEGARA ISLAM	138
A. Masyumi; Partisipasi politik dalam Pemerintahan, Dari Pengecam hingga partisipasi aktif.....	138
B. Negara Islam; Sebuah Cita-cita Bersama.....	159
C. Masyumi Menuju Jalan Sunyi.....	175

BAB V PENUTUP.....	190
A. Kesimpulan	190
B. Saran-saran.....	193
DAFTAR PUSTAKA	194
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia¹ dikenal sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Sekalipun Islam tidak disebut dalam konstitusi sebagai negara agama,² Islam di Indonesia adalah suatu agama yang hidup dan vital, yang kini sedang terlibat dalam proses transformasi dari posisi kuantitas ke posisi kualitas. Dengan kata lain islamisasi di Indonesia bukanlah suatu produk sejarah yang telah rampung, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan. Proses islamisasi sesungguhnya secara kualitatif belum mencapai tingkat yang sempurna, dengan demikian islamisasi belum mampu menggantikan sepenuhnya kepercayaan-kepercayaan dan tradisi-tradisi kultural lokal sebagai basis bagi organisasi sosial.

¹ Republik Indonesia terdiri dari 13.679 pulau, di antaranya 7.000 tidak dihuni. Encyclopedia Britannica Inc., *The New Encyclopaedia Britanica*, Vol. XXI (Chicago, 1997), hlm. 213. *Indonesia 1978 an Official Handbook*, terbitan Departemen of Information, Directorate of Foreign Information Service, (Jakarta, 1978), hlm. 7-8. Indonesia terdiri dari 13.667 pulau, sekitar 6000 pulau dihuni dan sisanya tidak layak dihuni oleh umat manusia. Pulau yang tidak punya nama ada 7.623. Akhir-akhir ini ada penemuan pulau-pulau baru di Indonesia yang keseluruhannya terdiri dari 17.508 buah: Ceramah Pendidikan dan Penelitian Pra-Jabatan Golongan III Angkatan V Gelombang I, Kelas A tahun 1999/2000 di Wisma Sarged, Jl. Pramuka No. 31 Yogyakarta pada tanggal 25 Agustus 1999 oleh Kolonel (Purn.) R. M. Aning Sunindyo, Kepala Mawil Hansip X, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari barat ke timur kepulauan Indonesia adalah 5.110 KM dan dari utara ke selatan adalah 1.880 KM: Departemen Of Internation, Directorate of Foreign Information Service, *Indonesia*, hlm. 7-8. Indonesia bertebaran pada kedua sisi katulistiwa antara 94°15' dan 141°05' bujur timur dan dari 6°08' lintang utara ke 11°15' lintang selatan. Luas keseluruhan kepulauan Indonesia sekitar 1.9004.569 KM persegi: Biro Pusat Statistik, *Statistik Indonesia* (Jakarta: 1975), hlm. 3, Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, cet. III, 1996), hlm. 1, M. Abdul Karim, *Islam dan Kemerdekaan Indonesia: Membongkar Marjinalisasi Peranan Islam dalam Perjuangan Kemerdekaan RI* (Yogyakarta: Sumbangsi Press, 2005), hlm. 12, dan M. Abdul Karim, *Islam Nusantara* (Yogyakarta: Gramasurya, 2014), hlm. 1.

² Mohammad Natsir, *Some Observations Concerning The Role of Islam in National and International Affair* (Ithaca, New York: Departement of Far Eastern Studies, Cornel University, 1954), hlm. 1

Perjuangan ideologi politik umat Islam Indonesia sudah dimulai sejak masa kebangkitan nasional, yakni dalam kurun waktu tahun 1920-an dan 1930-an yang mana perdebatan kalangan Islam dan nasionalis mengenai ideologi negara yang dicita-citakan.³ Gagasan-gagasan yang diperdebatkan itu seperti masalah apakah agama harus disatukan atau dipisahkan dari politik, masalah prinsip kenegaraan yang bagaimana yang harus dijadikan dasar negara dan sekularisasi politik dalam masyarakat berpenduduk mayoritas Muslim.

Perdebatan tersebut berlanjut hingga dalam sidang BPUUPK (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) masalah pokok yang dibicarakan adalah persoalan bentuk negara, batas negara, dasar filsafat negara dan hal-hal lain yang berkaitan dengan konstitusi negara.⁴ Pembahasan dasar negara dalam sidang tersebut membuat suasana politik menjadi sangat hangat. Pada saat itulah gagasan tentang Negara Islam⁵ muncul secara resmi di panggung politik Indonesia untuk pertama kali.

³ Abdul Qadir Djaelani, *Perjuangan Ideologi Islam di Indonesia* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996). Djaelani secara khusus menggupas bagaimana perjuangan ideologi yang diusung umat Islam berhadapan dengan ideologi lain, yaitu Kristenisme, Nasionalisme, dan Marxisme-Komunisme di Indonesia sejak masa penjajahan hingga saat ini.

⁴ Setelah bergumul selama lebih kurang 21 hari, akhirnya pada 22 juni 1945 suatu sintesis dan kompromi politik dapat diwujudkan antara dua pola pemikiran yang berbeda. Sintesis inilah yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dalam piagam ini, Pancasila diterima sebagai dasar negara, tapi urutan silanya mengalami perubahan letak. Sila Ketuhanan diberi anak kalimat pengiring “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Piagam ini adalah hasil rumusan Panitia Sembilan yang beranggotakan: Soekarno, Mohammad Hatta, A. A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Subarjo, Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin. Prawoto Mangkusasmito, *Perumusan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi* (Jakarta: Hudaya, 1970), hlm. 10

⁵ Tema Negara Islam muncul dalam catatan sejarah Indonesia, tidaklah selalu merupakan pekerjaan mudah. Hanya diketahui bahwa pimpinan Sarekat Islam seperti Surjopranoto dan Sukiman Wirjosandjojo telah berbicara tentang suatu kekuasaan atau pemerintahan Islam di akhir 1920-an. Surjopranoto menggunakan tema *een Islamietische regeering* (suatu pemerintahan Islam)

Gagasan Negara Islam telah mencapai suatu kesepakatan yang bersifat kompromistis antara golongan Islam dan nasionalis sekuler yang ditandai dengan disepakatinya Piagam Jakarta. Pada saat sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, yang mana jumlah anggota semula sebanyak 21, kemudian atas usul Soekarno, ditambah menjadi 27 orang. Sidang tersebut bertujuan menetapkan UUD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. UUD yang ditetapkan adalah UUD 1945, tetapi embrionya berasal dari UUD yang sudah dirancang sebelumnya termasuk di dalamnya Piagam Jakarta. Dalam proses tersebut, terjadilah peristiwa pencoretan anak kalimat pengiring sila “Ketuhanan” baik dalam pembukaan UUD maupun pasal 29 ayat 1. Istilah-istilah Islam yang semula dicantumkan pada pasal UUD juga dihapuskan. Peristiwa tersebut telah memberikan pukulan dan rasa kekecewaan bagi golongan Islam walaupun pada akhirnya sikap kompromistis golongan Islam terhadap peristiwa tersebut.

Proklamasi Kemerdekaan RI Pada tahun 1945 telah memberikan kesempatan yang sama kepada berbagai aliran politik di Indonesia dengan bebas membentuk partai-partai politik sebagai sarana demokrasi seperti dinyatakan oleh pasal 28 UUD 1945. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh umat Islam. Pada tanggal 7-8 Nopember 1945, melalui sebuah Kongres Ummat Islam di Yogyakarta dibentuklah sebuah partai politik Islam dengan nama Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Tetapi Masyumi yang

semantara Sukiman memakai istilah *een eigen Islamietisch bestuur onder een eigen vlag* (suatu kekuasaan Islam di bawah benderanya sendiri).

dibentuk tidak sama dengan Masyumi pada masa pendudukan Jepang, karena dibentuk dan didirikan oleh umat Islam sendiri tanpa campur tangan pihak luar sekalipun nama lama tetap dipakai. Dengan demikian pemimpin-pemimpin umat perlu membentuk sebuah partai politik Islam untuk menyalurkan aspirasi politik umat Islam Indonesia. Namun pada Juli 1947, unsur Sarekat Islam melepaskan diri dan mengembalikan Sarekat Islam kepada posisi partai yang berdiri sendiri. Guncangan besar dalam tubuh Masyumi terjadi pada Mei 1952, saat Nahdlatul Ulama mengikuti jejak Sarekat Islam meninggalkan Masyumi yang berdasarkan keputusan kongres di Palembang. Sejak saat itu, Nahdlatul Ulama menyatakan diri sebagai partai politik yang meninggalkan watak *jami'ahnya*.⁶

Pada 15 Januari 1948 Masyumi menarik menteri-menterinya dari kabinet Amir Sjarifuddin karena tidak setuju dengan genjatan senjata dan prinsip-prinsip politik yang diterima oleh pemerintah Amir. Mundurnya Masyumi dari kabinet berdampak adanya upaya demonstrasi yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) di Yogyakarta, yang menuntut pengunduran Amir Sjarifuddin sebagai Perdana Menteri, pembentukan Kabinet Presidensial, dan menolak Amir Sjarifuddin menjadi Perdana Menteri.⁷

Pada saat Kabinet Sjahrir I posisi Partai Masyumi sebagai oposisi dalam menentang pemerintahan. Karena menurut pandangan Masyumi saat itu bukanlah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan perundingan khususnya perundingan dengan Belanda. Sementara pada Kabinet Sjahrir II

⁶*Ibid.*, hlm. 38-39

⁷ Pramodya Ananta, dkk, *Kronik Revolusi Indonesia Jilid IV (1948)* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003), hlm. 3

Pada 11 Mei 1946, Partai Masyumi turut mendirikan sebuah pergerakan baru bernama Konsentrasi Nasional, yang mengambil alih pokok-pokok gerakan program Persatuan Perjuangan, namun mengubah sikap oposisinya menjadi dukungan kritis terhadap kabinet yang baru. Jika dilihat dari sikap dan aksi yang dilakukan oleh Partai Masyumi pada pemerintah, terlihat adanya sikap ambivalensi partai.

Pada Kabinet Sjahrir III, terdapat delapan anggota dan simpatisan Masyumi antara lain adalah: Mohammad Roem menjadi Menteri Dalam Negeri, Sjafrudin Prawiranegara Menteri Keuangan, Mohammad Natsir dibantu oleh A. R. Baswedan Menteri Penerangan, Jusuf Wibisono Wakil Menteri Bidang Kesejahteraan, H. Agus Salim Wakil Menteri Luar Negeri, Harsono Tjokroaminoto Wakil Menteri Pertahanan, Faturrachman Menteri Agama, dan K. H. Wahid Hasjim menteri tanpa portofolio. Pada 24 November, setelah pertemuan para wakil GPII, Muslimat, milisi *Hizbullah* dan *Sabilillah* serta beberapa anggota organisasi terkemuka dalam Masyumi, pimpinan pusat partai menolak dukungan terhadap persetujuan Linggarjati antara Indonesia-Belanda tertanggal 17 Oktober 1947 karena dianggap tidak menguntungkan pihak Indonesia.

Pada 3 April 1950, Mohammad Natsir, Ketua Fraksi Masyumi di DPR RIS, mengajukan Mosi Integral kepada DPR, yang menuntut agar semua negara bagian bersatu dan melebur ke dalam Negara Kesatuan. Mosi ini mendapatkan respons positif. Pada ulang tahun kemerdekaan Indonesia kelima pada 17 Agustus 1950, RIS digantikan oleh Republik Indonesia dengan

konstitusi UUDS 1950.⁸ Meskipun Partai Masyumi mendapat kesempatan memimpin kabinet, bukan berarti Partai Masyumi memonopoli dalam menentukan anggota-anggota kabinetnya. Sebagaimana Kabinet Natsir (1950-1951) telah berupaya merangkul berbagai partai lain dari: PIR, Demokrat, PSI, Parinda, Katholik, Parkindo, dan partai Syarekat Islam Indonesia.⁹

Masyumi bekerja sama dengan partai-partai Islam yang lain untuk memperjuangkan Islam sebagai ideologi Negara Indonesia dalam Majelis Konstituante. Pemilihan umum tahun 1955 menjadi hal penting dalam tiap-tiap kabinet sampai dengan ditetapkannya UU No. 7 tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. UU ini berhasil diterapkan oleh Kabinet Wilopo, dan Muhammad Roem yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan bersama-sama dengan Menteri Kehakiman bertanggungjawab atas terselenggaranya pemilu.

Negara Islam sebagaimana hasil kompromi antara golongan Islam dan nasionalis sekuler pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUUPK) muncul kembali ketika pembahasan dasar negara dalam Majelis Konstituante. Terlihat dengan jelas bahwa dua kekuatan (Islam dan Nasionalis) mempertahankan sikap dan pandangan masing-masing. Golongan Islam mempertahankan Islam sebagai asas negara menjadi kewajiban untuk diperjuangkan. Dapat dilihat semua golongan Islam (Masyumi, NU, PSII) bersatu dalam memperjuangkan Islam untuk dijadikan sebagai asas negara

⁸ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa; Genealogi Inteligensia Muslim Indonesi Abad ke-20* (Jakarta, Demokrasi Project, 2012), hlm. 395

⁹ Haniah Hanafi, "Partai-partai Islam di Indonesia" (Hasil Penelitian FUF-UIN Jakarta, 2005), hlm. 44

sebagaimana dalam Piagam Jakarta. Sementara golongan nasionalis sekuler tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara yang sudah dianggap baku berdasarkan hasil kompromi pada masa itu.

Dalam situasi yang tidak menentu pada sidang Majelis Konstituante sehingga Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya di depan Majelis Konstituante dengan judul *Res Publica*, pidato tersebut pada prinsipnya meminta dengan sangat agar majelis mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh gagasan untuk kembali kepada UUD 1945 sebagaimana sudah dirumuskan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal inilah yang mengawali proses keluarnya dekrit presiden 5 Juli 1959 yang diikuti dengan pelaksanaan “Demokrasi Terpimpin”, sehingga memaksa Dewan Pimpinan Pusat Masyumi atas desakan akar rumput partai, berbalik haluan ke posisi oposisi menentang keputusan tersebut.

Pada Kongres VIII di Bandung pada 22-29 Desember 1956 telah melahirkan resolusi mendesak pemerintah untuk mengubah rencana pembangunan lima tahun I (1956-1960) dengan mengalihkan sebagian investasi dan bantuan sosial di pulau-pulau luar Jawa dan kepada penduduk di kawasan terpencil yang jauh dari kota besar, dan terutama meninjau ulang kebijakan liberalisasi ekonomi yang tercantum pada program urgensi 1954. Seraya mendesak pemerintah memberi perlindungan yang layak kepada

perusahaan-perusahaan nasional hingga mencakup semua sektor ekspor-impor maupun pembatasan modal asing dan tenaga kerja asing hingga 15 tahun.¹⁰

Negara Islam yang diperjuangkan oleh Masyumi sebagaimana Dalam Anggaran Dasar, dirumuskan secara jelas sebagai berikut: “tujuan partai adalah terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat, dan Negara Republik Indonesia, menuju keridhaan Ilahi”.¹¹ Dari segi politik, Masyumi, melalui para tokoh pemimpinnya, banyak berandil dalam merumuskan doktrin politik Islam. Namun, Masyumi adalah sebuah partai politik yang terus menerus dihadapkan pada berbagai macam persoalan, yang mana kecenderungan keagamaan dan politik yang sulit dipersatukan.

Masyumi dikategorikan sebagai partai beraliran modernis, pengkategorian tersebut berdasarkan pada struktur organisasi partai modernis yang cenderung bersifat birokratis berdasarkan pembagian kekuasaan, yaitu antara badan legislatif dan badan eksekutif. Sesuai dengan pandangan modernisme¹² mengenai *ijma* sebagai konsesus mayoritas kaum Muslim pada

¹⁰ Remy Madinier, *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral* (Jakarta: Mizan dengan Forum Jakarta Paris, 2013), hlm. 217

¹¹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik Indonesia: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hlm. 33

¹² Modernisme, pada awalnya diartikan sebagai aliran keagamaan yang melakukan penafsiran terhadap doktrin agama kristen untuk menyesuaikan dengan perkembangan pemikiran modern. Istilah modernisme sering juga diganti dengan istilah-istilah lain seperti *reformism*, *reawakening*, *renaissance*, dan *renewal*. Istilah modernisme dalam arti yang positif dianggap sebagai usaha untuk mengadaptasikan Islam dengan nilai-nilai modern dan *up to date*. Penulis sangat sulit untuk menemukan istilah lain yang tepat untuk mengganti istilah modernisme kedalam bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lain yang digunakan oleh masyarakat Muslim. Kaum modernis yang berbahasa Arab dan Urdu menggunakan istilah *tajdid*, *Ishlah*, atau *Salaf* untuk menyebut diri mereka sendiri. Tetapi kelompok lain yang kurang simpati dengan mereka menyebutnya *al-Muslim al-Mugharrab* (muslim yang terbaratkan). Kaum Muslim di Indonesia dan Malaysia pada umumnya menggunakan dua istilah, yaitu “kaum muda” dan “kaum

suatu zaman tertentu, partai modernis pada umumnya cenderung untuk tidak memberikan kedudukan yang dominan kepada kalangan ulama dalam membuat keputusan dalam struktur partai. Kepemimpinan partai modernis bersifat terbuka. Semua anggota berhak untuk menduduki semua jabatan dalam struktur partai. Sesuai dengan pandangan-pandangan dasar modernisme, maka kepemimpinan partai modernis cenderung di dominasi oleh tokoh-tokoh yang berpendidikan Barat. Tokoh-tokoh berpendidikan agama, bahkan para ulama, cenderung tidak memainkan peranan yang menentukan dalam membuat keputusan-keputusan politik.

Pada umumnya terdapat tiga alternative Negara Islam yaitu negara berdasarkan Pancasila seperti dikemukakan dalam Muqaddimah Konstitusi 1945 sebagai antipode “sekuler” yang terdahulu, dan pembentukan negara seperti yang dinyatakan dalam Piagam Jakarta berdasarkan hasil kompromi. Piagam Jakarta yang mengemukakan versi Pancasila yang berbeda, menetapkan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam, yang merupakan hasil kompromi yang tercapai antara pendukung Negara Islam dan pendukung Negara Sekuler pada Juni 1945. Pada akhirnya, 18 Agustus 1945 Piagam Jakarta ini dihilangkan dari Konstitusi. Piagam Jakarta menjadi wahana perjuangan politik bagi kalangan Islam yang menolak jalan kekerasan Darul Islam dan yang ingin mencapai cita-cita Islam dengan cara legal Konstitusional.¹³

Pemabahnya”. Tetapi kedua istilah tersebut digunakan dalam konteks reaksi terhadap paham “kaum tua” atau “kaum kolot”. Yaitu paham kaum tradisional.

¹³ C. Van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan* terj. Grafiti Pers (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), hlm. xx

Struktur politik Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 oleh Kartosuwiryo¹⁴, diuraikan dalam konstitusinya “*Kanun Azasi*” yang dirancang setahun sebelumnya, Agustus 1948. Menurut konstitusi itu, Negara Islam Indonesia adalah Karunia Ilahi, yaitu negara karunia Allah subhanahu wa Ta’ala yang dilimpahkan kepada rakyat Indoensia. (pasal 1 ayat 1). negara menjamin berlakunya syariat Islam dalam masyarakat Islam serta menjamin kepada para pemeluk agama-agama lain kebebasan untuk beribadat menurut upacaranya masing-masing (pasal 1 ayat 3-4). Islam adalah landasan dan dasar hukum Negara Islam Indonesia, dengan berpegang kepada al-Qur’an dan Hadist sebagai kekuasaan yang tertinggi (pasal 2 ayat 2-3).¹⁵

Menurut catatan Compton., “M. Daud Beureuh juga berbicara tentang sebuah Negara Islam untuk seluruh Indonesia, dan bukan hanya untuk Aceh yang merdeka. Ia meyakinkan kemerdekaan beragama akan dijamin di Negara seperti itu, dengan menekankan contoh mengenai toleransi bagi penganut Kristen dalam negara-negara Islam Timur Dekat. Kaum Kristen akan diberi kebebasan dan dilindungi dalam Negara Islam Indonesia, sedangkan umat Islam tidak dapat merasa sejati kalau mereka tidak hidup dalam sebuah negara yang didasarkan atas ajaran-ajaran al-Qur’an. Hal ini diperkuat setelah kongres di Medan ia melakukan ceramah keliling Banda Aceh dengan nada

¹⁴ Pada dasarnya Kartosuwiryo merupakan salah satu tokoh pendiri Masyumi baru pada November 1945, dia menduduki jabatan sekretaris pertama (pinardi 1964: 31). Dia juga diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mewakili Masyumi. Pada sidang kelima KNIP di Malang pada Februari dan Maret 1947, kartosuwiryo sebagai salah seorang dari lima anggota Masyumi dalam komite eksekutif, tang terdiri dari 47 anggota. *Ibid.*, hlm. 72

¹⁵*Ibid.*, hlm 83

profokatif mendukung Negara Islam yang di proklamasikan oleh Kartosuwiryo.

Sementara Kahar Muzakir mendefinisikan Darul Islam dengan mengutip kitab *al-Tasyrik al-Jihana al-Islami* karangan Abdul Qadir 'Audah (pemimpin al-Ihwanul Muslimin), yaitu pertama, tiap-tiap negara yang penduduknya semuanya Kaum Muslim; kedua, tiap-tiap negara yang penduduknya mayoritas kaum Muslim; ketiga, tiap-tiap yang diperintah dan dikuasai oleh kaum Muslim, walaupun penduduk yang terbanyak bukan kaum Muslim; dan keempat tiap-tiap negara yang dikuasai dan diperintah oleh bukan kaum Muslim tetapi penduduknya yang kaum Muslim dapat menjalankan hukum-hukum Islam atau tidak ada halangan untuk menjalankan hukum Islam.¹⁶ Gagasan-gagasan tersebut yang kemudian diperjuangkan oleh Partai Masyumi dalam Konstituante.

Namun komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi ini ditunjukkan oleh Muhammad Natsir, yang merupakan representasi *par excellence* Islam politik. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri, dia menentang keras pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat (1948-1962). Dia percaya bahwa konsep Negara Islam tidak dapat dicapai melalui kekuatan bersenjata, melainkan harus dengan jalan konstitusional, yaitu sesuatu yang belum tercapai dan masih jauh dari kenyataan pada masa itu. Di sisi lain, Natsir menegaskan bahwa kaum Muslim harus memperjuangkan tata politik yang demokratis. “Sejauh berkait dengan (pilihan) kaum Muslim,

¹⁶ Abdul Kahar Muzakir, *Konsepsi Negara Islam* (Laporan tugas yang disampaikan dalam Konferensi Tanwir Muhammadiyah Pekalongan, 21-24 Juli 1953), hlm. 2-3

demokrasilah yang diutamakan karena Islam hanya dapat berkembang dalam sistem yang demokratis”.¹⁷

Dengan demikian, Partai Masyumi tidak terlalu terobsesi dengan klaim-klaim mereka akan pendirian Negara Islam.¹⁸ Hal ini bukan hanya dibuktikan dengan pengecaman mereka terhadap gerakan Darul Islam pada 1950-an merupakan gerakan bersenjata yang bertujuan mendirikan Negara Islam melainkan juga dengan penghormatan mereka terhadap prosedur-prosedur dan mekanisme-mekanisme demokrasi.

Di Indonesia, Masyumi merupakan partai yang terlibat dalam elit pemerintahan antara lain dengan membentuk pemerintahan atau berkoalisi dengan partai-partai lain sehingga Masyumi turut memainkan peranan dalam menentukan dasar politik di Indonesia hingga menjelang tahun 1960. Presiden Soekarno membubarkan Masyumi dengan tuduhan “kontra revolusi”.¹⁹ Salah satu sebabnya adalah keterlibatan sebagian tokoh Masyumi di dalam PRRI menjadi salah satu alasan Presiden Soekarno untuk membubarkan partai ini.²⁰ Dengan demikian dalam kajian ini, peneliti menempatkan Partai Masyumi sebagai contoh kasus dengan menggunakan dua teori yaitu *fungsiionalisme* dan *collective action* dalam melihat tindakan politik Partai Masyumi dalam upaya memperjuangkan Negara Islam di Indonesia.

¹⁷ George Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca: Cornell University, 1970), hlm. 161.

¹⁸ Situasi ini tentu saja akan berbeda di negara-negara Muslim tempat Islam diperlakukan sebagai ideologi formal negara ketimbang semata-mata sebagai ikon politik identitas.

¹⁹ Soekarno, *Menemukan Kembali Revolusi Kita* (Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1960).

²⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/1960 tentang pembubaran partai politik Masyumi, ditandatangani oleh Presiden Soekarno.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang Collective Action Partai Masyumi Dalam Upaya Mendirikan Negara Islam, 1945-1960²¹. Oleh karena demikian dalam penelitian ini pembatasan tahun sangat perlu agar pembahasannya lebih fokus pada proses tindakan politik yang dilakukan oleh Partai Masyumi yang memperjuangkan Negara Islam di Indonesia. Dengan demikian, peneliti akan menjawab beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah sistim nilai dan orientasi politik Partai Masyumi dalam memperjuangkan Negara Islam?
2. Bagaimana tindakan politik Partai Masyumi memperjuangkan Negara Islam di Indonesia sebagai pintu perubahan dan kemandekan serta dampak tindakan politik dalam sistim budaya dan politik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Dengan deskripsi rumusan masalah di atas, penelitian mengenai tindakan politik Partai Masyumi yang memperjuangkan Negara Islam di Indonesia sebagaimana diuraikan diatas, maka penelitian ini penting dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah sistim nilai dan orientasi politik partai masyumi dalam memperjuangkan Negara Islam ?

²¹ Tahun 1945 merupakan awal didirikannya Partai Masyumi sebagai payung politik umat Islam Indonesia, sementara pada tahun 1960 adalah pembubaran Partai Masyumi secara konstitusional oleh Presiden Soekarno.

2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan politik Partai Masyumi memperjuangkan Negara Islam di Indonesia sebagai pintu perubahan dan kemandekan?
 3. Untuk mengetahui bagaimana dampak tindakan politik dalam sistim budaya dan politik?
2. Kegunaan penelitian

Secara akademik, Penelitian ini berguna bagi pengembangan studi sejarah politik Islam dalam sejarah Islam di Indonesia. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka keberadaan dan peran politik Islam dalam kehidupan berpolitik masih sangat dibutuhkan serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wawasan keilmuan dalam studi ke-Islaman. Secara praktis penelitian ini berguna untuk memberikan masukan konstruktif bagi politik Islam dalam meningkatkan peran politik Islam dalam kehidupan bernegara. hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan gerakan ke-Islaman di Indonesia pada umumnya.

D. Kajian Pustaka

Buku pertama yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi Dan Islam Integral* yang ditulis oleh Remy Madinier. Pembahasan dalam buku ini memaparkan sumbangan Masyumi terhadap sejarah Islam dalam kaitannya dengan politik, aksi partai politik Masyumi sebagai wadah perjuang kalangan Islam sebagai eksperimen orisinal dari suatu bentuk demokrasi Islam yang berkiblat pada model

demokrasi parlementer Barat. Masyumi secara bersamaan mengekspresikan wujud yang sangat klasik dari suatu bentuk Islam integral yang tampak dari pendirian moral yang menuntut kepatuhan terhadap norma Islam. Ia pun menggugah kita untuk memperbarui analisis mengenai relasi Islam dan politik, baik melalui perbandingan doktrin masyumi dengan aliran-aliran Islamis yang lain.

Buku Kedua adalah *Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam; Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan)* yang di tulis oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Buku ini adalah naskah sebuah disertasi untuk memperoleh gelar *Doctor of Phylosophy* di Universitas Sains Malaysia pada tahun 1993. Studi yang di analisis dalam buku ini adalah upaya membandingkan antara partai Masyumi yang bersifat Modernisme dan Partai Jama'at al-Islami yang bersifat fundamentalisme. Upaya yang ingin dicapai dalam buku ini adalah ingin mencari sisi persamaan dan perbedaan antara kedua partai tersebut. Namun, kesimpulan akhir dari buku ini menunjukkan bahwa kedua partai tersebut tidak menunjukkan adanya persamaan, namun justru perbedaan yang cukup jauh antara kedua partai tersebut.

Studi tentang *Percaturan Dalam Konstituante Islam Dan Masalah Kenegaraan* oleh Ahmad Syafii Maarif, awalnya buku ini berasal dari disertasi Ahmad Syafii Maarif untuk memperoleh gelar Doctor di *Chicago University Amerika Serikat*. keseluruhan isi buku ini selain pendahuluan dan penutup terdiri dari tiga bab; pertama, Islam dan cita-cita politik; kedua, Islam

Indonesia pada abad ke-20; dan ketiga, Islam dan dasar Negara Indonesia. Substansi yang dibahas oleh Ahmad Syafii Maarif dalam buku ini sedikit ada kesamaan dengan apa yang akan dibahas dalam tesis ini, namun dalam buku tersebut membahas secara universal sementara pembahasan dalam tesis ini lebih spesifik pada partai Masyumi itu sendiri.

Partai-Partai Islam Di Pentas Nasional; 1945-1960 yang ditulis oleh Deliar Noer. Buku ini cukup representative di jadikan sebagai rujukan pustaka dalam penelitian ini, karena buku ini merupakan hasil kajian yang mendalam tanpa ada manipulasi fakta maupun kerancuan yang mencolok, meskipun demikian keterlibatan para penulis dalam sejarah yang dituliskannya menyulitkan mereka mengambil jarak yang diperlukan untuk menilik dengan pandangan kritis. Akibatnya nampak kelemahan yang saling bertolak belakang yaitu: timbul perasaan takut dituduh sebagai penulis sejarah yang terlibat sebagai pelaku di dalamnya.

Selanjutnya, *Partai Masyumi Dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia*, oleh Insan Fahmi Siregar. Buku ini adalah tesis beliau ketika menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia dengan judul *Partai Masyumi; Pembentukan, Perkembangan dan Pembubarannya 1945-1960*. Dalam pembahasan buku tersebut lebih kepada dinamika partai dalam demokrasi di Indonesia. Yang lebih di tonjolkan oleh Siregar dalam buku ini yakni sebab-sebab pembubaran partai Masyumi dimana dinamika antara para pemimpin partai Masyumi dengan Presiden Soekarno yang berimbas pada pembubaran partai Masyumi itu sendiri.

Sebagaimana penulis ketahui bahwa memang kajian tentang partai Masyumi sudah banyak dilakukan, misalnya Remi Madinier lebih kepada godaan Demokrasi dan Islam Integral yang mempengaruhi sepak terjang partai dalam demokrasi di Indonesia, Deliar Noer, lebih kepada peran partai-partai Islam dalam politik nasional, akan tetapi dalam pembahasan Masyumi lebih dominan daripada pembahasan tentang partai-partai Islam yang lain. Dari keseluruhan buku yang tersebut di atas, tidak ada pembahasan yang lebih spesifik pada upaya Partai Masyumi dalam mendirikan negara Islam. Karya-karya yang sudah penulis sebut di atas merupakan sumbangsih yang sangat besar dalam kajian sejarah politik Islam di Indonesia. Negara Islam dalam konteks perjuangan politik Masyumi yang coba penulis kaji adalah dengan melihat bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pemimpin partai dalam merumuskan cita-cita perjuangan dalam politik nasional pada era awal kemerdekaan Republik Indonesia hingga dalam perdebatan di Majelis Konstituante. Dalam kajian tesis ini penulis lebih spesifik pada usaha dan tindakan politik partai dalam memperjuangkan Negara Islam sebagaimana cita-cita yang sudah dirumuskan dalam berbagai program-program politik partai Masyumi lewat kongres-kongres yang diadakan oleh partai Masyumi.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh partai Islam Masyumi untuk menjadikan Indonesia menjadi Negara Islam dalam bingkai demokrasi, Negara Islam adalah sebuah proyek yang diperjuang secara konstitusional oleh Partai Masyumi dalam demokrasi di Indonesia pada awal-awal kemerdekaan hingga demokrasi parlementer. Usaha-usaha tersebut ada pula yang dilakukan

atau diperjuangkan melalui jalur inkonstitusional seperti yang dilakukan oleh gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia. Semua usaha tersebut nampaknya belum pernah berhasil. Hal inilah yang membuat peneliti mengkaji tentang tindakan politik Islam yang diperankan oleh Partai Masyumi sebagai sebuah refleksi sejarah yang tak kunjung habis untuk dibicarakan dari beberapa buku yang dijadikan sebagai rujukan di atas nampaknya berbeda dengan apa yang peneliti kaji, sebab peneliti lebih menfokuskan pada tindakan Partai Masyumi yang berusaha memperjuangkan ide-ide Negara Islam secara konstitusional.

Dalam penulisan tesis ini Peneliti tidak menempatkan diri seolah-olah terlibat di dalam Partai Masyumi itu sendiri, namun peneliti menempatkan Partai Masyumi sebagai contoh kasus dalam penelitian ini. Hal inilah yang menjadi pembeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh penulis-penulis di atas.

E. Kerangka Teoritik

Secara konsep penelitian ini terkait “ideologi”. Penelitian ini membahas dan menfokuskan pada upaya Partai Masyumi memperjuangkan cita-cita politik Islam (Negara Islam) di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kajian ini berusaha melihat tindakan kolektif Partai Masyumi serta para pemimpin-pemimpin Masyumi dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara yang bersifat demokratis dan Republik. Selain itu juga orientasi dan sistim nilai Partai Masyumi serta tindakan yang menghasilkan integritas, adaptasi di

tingkat akar rumput yang pada akhirnya menuju tujuan yang ingin di capai yaitu Negara Islam.

Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terhadap tindakan politik Islam Partai Masyumi dengan rentang waktu 1945-1960, peneliti menggunakan dua teori yaitu pertama teori fungsional; dalam menggunakan teori fungsional bahwa tindakan-tindakan politik Partai Masyumi itu tidak terlepas dari orientasi politik dan sistem nilai dari aksi politik yang memiliki fungsi menyatukan pola-pola sistem integritas, adaptasi, dan tujuan yang akan dicapai secara bersama dan yang terakhir yakni latensi.²² Sistem tersebut untuk melihat aksi Partai Masyumi yang memiliki kekuatan besar dan orientasi nilai dari kepribadian pemimpin-pemimpin partai ketika terlibat dalam situasi politik pada masa itu. Sikap kritis terhadap berbagai kebijakan politik pemerintah serta aksi-aksi politik baik itu aksi oposisi, terlibat dalam sistem pemerintahan, menunjukkan upaya-upaya mencapai tujuan yang di cita-citakan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia secara konstitusional. sebagaimana skema dalam table di bawah ini:

Kedua, adalah teori Collective Action²³ yang dirumuskan oleh Charles Tilly merupakan teori yang mengkaji peristiwa yang mana orang secara bersama-sama melakukan tindakan bersama atau berjuang untuk mencapai

²² Talcot Parson, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), hlm. 48 lihat Juga Soerjono Soekanto dan Ratih Lestarini, *Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm. 33-52

²³ Penggunaan teori "Collective Action" dalam tesis ini yakni untuk melihat tindakan politik yang dilakukan oleh partai islam (Masyumi) baik itu orientasi, sistim nilai yang dilakukan dengan kolektivitas secara makro dan mikro, serta ideologi Negara islam yang menjadi tujuan dan cita-cita politik islam partai Masyumi di Indonesia secara kolektif dan kelembagaan. Dalam pandangan peneliti penggunaan teori "Collective Action" ada relevansinya dengan pembahasan tesis ini, karena penelitian ini adalah penelitian sejarah yang ideografis.

tujuan dan kepentingan bersama.²⁴ Dalam penelitian ini *Collective Action* diartikan juga sebagai aksi bersama secara sadar oleh berbagai pihak melalui berbagai proses sosial dan politik untuk mencapai tujuan bersama.

Tilly membedakan tiga jenis *collective action* masing-masing dengan faktor penyebabnya sendiri. Jenis pertama adalah *competitive collective action*, yaitu adanya dua pihak atau lebih yang bersaing untuk merebut atau menegakkan sesuatu. Dalam hal ini, persaingan antara golongan Islam (Masyumi) dan nasionalis sekuler mempertahankan ideologi masing-masing dalam perdebatan mengenai dasar Negara Indonesia pada Majelis Konstituante. Jenis yang kedua adalah *reactive collective action* yakni upaya kelompok masyarakat untuk mengembalikan hak-hak yang mapan yang telah digusur oleh pihak tertentu, terutama negara dan lembaga-lembaganya. Faktor penyebab dalam jenis ini adalah tergusurnya hak-hak yang telah mapan dalam masyarakat. Jenis yang ketiga adalah *proactive collective action*, yaitu upaya kelompok masyarakat atau organisasi politik Islam (Masyumi) untuk menciptakan suatu struktur sosial yang baru yang sebelumnya tidak ada. Dalam artian Negara Islam yang diperjuangkan oleh Partai Masyumi tidak seperti dinasti Islam pada masa abad keemasan Islam, akan tetapi Negara Islam yang diperjuangkan lebih mengacu pada sistem demokrasi Barat. Salah satu variasinya adalah revolusi yang disebabkan oleh faktor politis.²⁵

²⁴ Wahyudi, *Formasi Dan Struktur Gerakan Sosial Petani* (Malang, UMM Press, 2005), hlm. 24

²⁵ Tilly "Collective Action" Revolution, Kisah Tawanan Boven Digul. *Jurnal Sejarah Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi*; Vol 6. No. I Agustus 2004 (Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia, 2004), hlm. 7-8

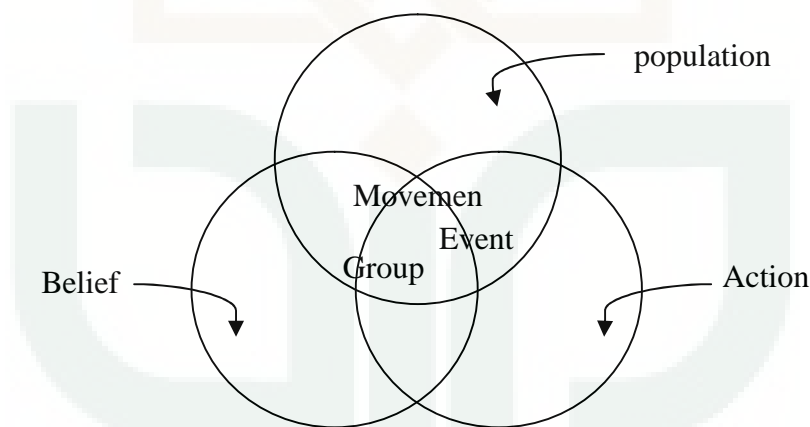
Teori Tilly tersebut dimaksudkan untuk mempelajari perubahan politik, maka yang menjadi sorotan adalah struktur politik yang merupakan sebagian dari struktur sosial. Struktur politik sebagai bagian dari struktur sosial dengan sendirinya terdiri dari peran politik Partai Masyumi, interaksi antara peran-peran, dan sistem nilai yang mengatur interaksi serta mentalite atau pemikiran politik pemimpin-pemimpin partai Masyumi. Struktur politik juga bersifat menghambat atau memudahkan dengan kelompok politik yang aktif berinteraksi dengan struktur tersebut untuk mengubahnya.²⁶

Menurut Tilly, *Collective Action* mengandung lima komponen besar yaitu: pertama, kepentingan bersama (*common interest*) yakni mengkaji tentang bagaimana keuntungan yang diperoleh karena adanya interaksi dengan kelompok lain; kedua, organisasi yakni struktur kelompok yang secara langsung berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan aksi dengan kapasitasnya untuk bertindak atas kepentingannya; ketiga mobilisasi yakni proses yang mana sekelompok orang secara bersama mengontrol sumber daya yang dibutuhkan untuk aksi. Dalam konteks ini sumber daya dapat berupa tenaga, harta benda, senjata maupun suara dalam pemilihan. Analisis mobilisasi berkaitan dengan cara-cara yang ditempuh kelompok tertentu untuk memperoleh sumber daya dan membuat mereka bersedia melakukan aksi serta tindakan bersama untuk mencapai tujuan; keempat, kesempatan berfungsi untuk melihat hubungan kelompok dengan dunia sekitarnya. Perubahan dalam hubungan antar kelompok kadang-kadang memberikan ancaman dan juga

²⁶ *Ibid.*, hlm. 8

peluang baru untuk bertindak atas kepentingan mereka, hubungan antara kelompok dengan dunia sekitarnya terdiri atas tiga elemen: *Power*, yaitu kemampuan untuk mengunggulkan kepentingan terhadap kelompok saingan, *repression* yaitu kelompok sosial tertentu dapat ditekan atau didukung oleh kelompok lain tergantung power kelompok sosial tersebut, sementara *opportunity* dan *threat* adalah posisi yang menguntungkan atau sebaliknya dalam interaksinya dengan kelompok lain sehingga memiliki kesempatan yang dapat diwujudkan dalam aksi; dan kelima, tindakan kolektif (*Collective Action*) yakni tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi tertentu bersama-sama dalam memperjuangkan kepentingan bersama.²⁷

Untuk lebih jelas kita perhatikan table di bawah ini:²⁸



Penggunaan teori tersebut bagi peneliti sangat memungkinkan untuk menganalisis apakah aktor politik Partai Masyumi bertindak tepat menurut citat-cita atau menyimpang dari cara-cara yang yang sudah ditetapkan oleh

²⁷ Charles Tilly, *From Mobilization To Revolution* (Michigan: University of Michigan, 1977), hlm. 10-13 dan Djoko Marihandono, *Titik Balik Historiografi di Indonesia* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra bekerjasama dengan Departemen Sejarah FIB UI, 2008), hlm. 313-314

²⁸ Tilly, *From...*, hlm. 13

Partai Masyumi itu sendiri secara kelembagaan. Pemusatan perhatiannya pada tindakan bersama para pemimpin politik Partai Masyumi yang pada akhirnya melahirkan sistim kepribadian, perilaku, serta budaya dan politik Partai Masyumi yang kemudian melahirkan hubungan makro-mikro pada perilaku sistem sosial umat Islam Indonesia. Tidak hanya itu penggunaan teori *collective action* juga bertujuan untuk mengetahui sebab dari pengaruh aktor Partai Masyumi yang mampu mengajak orang lain untuk menuruti apa yang dikehendakinya.

Model analisis dalam kajian ini menggunakan model yang dibangun oleh Tilly yaitu *Mobilization Model*. Kepentingan bersama yang kemudian membentuk aksi bersama berdasarkan dorongan kepentingan bersama golongan Islam untuk membentuk sebuah partai politik Islam sebagai satu-satunya wadah untuk menyampaikan aspirasi ummat dan penilaian terhadap kepentingan kelompok lain. Selanjutnya wadah tersebut berfungsi untuk menekan atau malah mendukung segala kebijakan-kebijakan politik pemerintah.²⁹

Untuk lebih memudahkan memahami teori dapat dilihat diagram teori sebagai berikut :

²⁹ *Ibid.*, hlm. 56

BAGAN TEORI



F. Metode Penelitian

Untuk mencapai penulisan sejarah secara maksimal, maka rekonstruksi masa lampau pada objek penelitian ini di gunakan prosedur-prosedur atau langkah-langkah sebagai berikut; Pertama, heuristik (pengumpulan data) suatu tahapan atau langkah-langkah kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan materi sejarah.³⁰ Usaha pencarian sumber sejarah dilakukan dengan menelusuri buku-buku yang memuat berbagai informasi tentang objek yang menjadi kajian di berbagai perpustakaan-perpustakaan lebih khusus perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan UGM, dan lain sebagainya. Dengan demikian peneliti akan mendapatkan sebanyak mungkin jejak-jejak sejarah yang ditemukan.

Tahap kedua adalah Verifikasi (kritik sumber), disebut juga dengan kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini yang harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber yang dilakukan melalui kritik eksternal dan keabsahan tentang kesahihan sumber yang ditelusuri melalui kritik internal.³¹ Dalam menentukan asli dan tidaknya sumber perlu menyeleksi segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan. Jika sumber tersebut merupakan dokumen tertulis maka harus diteliti kertas, tinta, gaya penulisan, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, hurufnya, dan segi penampilan luarnya.³² Keshahihan sumber merupakan faktor yang menentukan sah dan tidaknya bukti atau fakta sejarah itu sendiri. Dalam hal

³⁰ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 86

³¹ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 108

³² *Ibid.*, hlm. 108

menguji kredibilitas sumber lisan sebagai fakta sejarah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: pertama, sumber lisan harus didukung oleh saksi yang berantai dan disampaikan oleh pelapor pertama yang terdekat. Sejumlah saksi harus sejajar dan mampu mengungkapkan fakta yang teruji kebenarannya. Kedua, sumber lisan mengandung kejadian penting yang diketahui umum, dalam artian telah terjadi kepercayaan umum pada masa tertentu selama masa tertentu dapat berlanjut tanpa protes atau penolakan perseorangan. Tradisi lisan terkadang dapat lebih dipercaya dibandingkan dengan sumber tertulis, karena kredibilitas sumber baik tertulis maupun lisan pada prinsipnya dapat diakui apabila semua positif.³³

Tahapan selanjutnya adalah interpretasi (analisis fakta sejarah) dilakukan dalam penulisan sejarah (historiografi). Proses interpretasi atau analisis data dilakukan dengan cara sintesis terhadap fakta sejarah yang diperoleh melalui eksplanasi sejarah.³⁴ Oleh karena itu, interpretasi dilakukan terhadap data sejarah berupa dokumen-dokumen tertulis, hasil wawancara dan observasi yang mengacu pada kategori konseptual penelitian ini.³⁵ Fakta sejarah dikategorisasikan sesuai dengan gerakan politik Islam Partai Masyumi dalam memperjuangkan asas Islam secara konstitusional pada masa pasca Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hingga Masyumi dibubarkan

³³*Ibid.*, hlm. 113

³⁴ Ibrahim Alfian, *Sejarah dan Permasalahan Masa Kini* (pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada) (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 1985), hlm. 7

³⁵ Dudung Abdurrahman, "Gerakan Sosial-Politik Kaum Tarekat di Perianan Pada Abad XX". Sebuah disertasi di UIN Sunan Kalijaga tahun 2008, hlm. 29

pada tahun 1960.³⁶ Sebagai tahapan akhir dari penelitian ini historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Hasil penelitian sejarah terkait dengan tema atau topik tersebut hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak dari awal sampai pada penarikan kesimpulan. Dengan demikian penelitian tesis ini dapat dinilai apakah penelitian berlangsung sesuai dengan prosedur yang tepat atau tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya Pembahasan tentang karya-karya lain dalam sub pembahasan kajian pustaka guna mempertajam perbedaan dengan penelitian terdahulu serta memperkaya kerangka teoritik ditempatkan dalam sub pembahasan tersendiri, sebagaimana pembahasan tentang metodologi penelitian dan selanjutnya pembahasan pada bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang sistem nilai dan orientasi politik Partai Masyumi dalam memperjuangkan Islam sebagai asas negara di Indonesia. Dalam pembahasan ini menfokuskan pada pembahasan tentang sistem nilai, orientasi politik partai Masyumi, dan yang terakhir adalah tujuan partai Masyumi itu sendiri.

³⁶ Pembubaran Partai Masyumi diawali dengan keluarnya dekrit Presiden 5 Juni 1959 sebagai awal dari pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Kondisi politik pada masa itu telah membuat Partai Masyumi semakin terpojok karena dianggap tidak mendukung konsepsi Soekarno untuk kembali kepada UUD 1945 dan lebih mendukung pemberontakan PRRI, hal tersebut dikarenakan beberapa pimpinan Masyumi terlibat dalam pemberontakan tersebut.

Bab III lebih kepada pembahasan tentang tindakan-tindakan politik partai Masyumi serta dampak dari tindakan politik dalam sistem budaya dan sistem politik. Dalam pembahasan ini penulis menguraikan beberapa tindakan politik partai sejak awal berdirinya November 1945 hingga partai dibubarkan oleh presiden Soekarno pada tahun 1960.

Pada pembahasan Bab IV. Bab ini penulis membahas Analisis *Collectif Action* Partai Masyumi dalam memperjuangkan Negara Islam. Pembahasan pada bab ini dibagi beberapa sub pembahasan antara lain: pertama, Masyumi; partisipasi politik dalam pemerintahan, dari pengecam hingga partisipasi aktif, kedua, Negara Islam; sebuah cita-cita bersama, dan yang ketiga Masyumi menuju jalan sunyi.

Pada Bab V yaitu kesimpulan dan saran. Pada bagian ini dapat disimpulkan pembahasan dari tindakan Politik Islam itu sendiri muncul di ruang publik yang menjadikan dinamika politik kalangan Islam sehingga muncul perbedaan-perbedaan pemikiran dan gagasan dalam memperjuangkan penerapan asas Islam di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pendirian moral menuntut kepatuhan terhadap norma Islam, memberikan pemahaman kepada kita terhadap partikularitas Islam Indonesia. Upaya pemaduan Islam dan demokrasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Partai Masyumi telah menempatkan mereka sebagai penerus modernisme Islam. Para pemimpin Masyumi mendasarkan tindakan politiknya pada penafsiran ulang al-Qur'an dari sudut pandang politik dan sosial seraya mengkaji ulang konsep-konsep penting *ijma* dan *syura*, ataupun *amar ma'ruf nahi munkar*.

Sikap keterbukaan para pemimpin Masyumi merupakan hasil usaha memadukan konsep-konsep Islam sebagai bukti universalitas nilai-nilai Islam. *Ijtihad* tidaklah terbatas pada pemurnian agama semata, namun dalam memperjuangkan cita-cita Negara Islam di Indonesia tidak harus mengacu pada model sistem pemerintahan Islam klasik dan pertengahan. Pengacuan terhadap Negara Islam yang dibangun oleh Nabi di Madinah, bagi Masyumi tidak dapat mewakili cita-cita politik Partai Masyumi, karena situasi kultural masyarakat Islam Indonesia berbeda dengan masyarakat Islam di Jazirah Arab pada masa itu.

Kontradiksi terhadap kebudayaan politik Awal Abad XX M, telah menunjukkan upaya Masyumi melepaskan diri dari budaya politik tersebut. Pertama adalah penerimaan dan pembelaan terhadap Republik Indonesia

sebagai sebuah Negara-Bangsa (*Nation-State*), yang mana pengertian *ummat* dirangkum dalam bingkai nasional. Kedua adalah memperlihatkan terobosan konsepsi politik Islam klasik terungkap dari evolusi partai itu sendiri. “Tuntutan persatuan telah mendorong Islam untuk mencurigai segala bentuk pengelompokan yang memilah-milah umat manusia berdasarkan klan dan faksi serta mengilhami mereka pada ketaatan dan kesetiaan tertentu”.²⁴⁷

Masyumi pada awal-awal pendirian masih mempertahankan persatuan dengan mengacu pada sebuah dogma keesaan Tuhan (*tauhid*) dan mengisyaratkan hanya ada satu kemungkinan politik bagi ummat Islam Indonesia. Seiring dengan perjalanan waktu fondasi tersebut mulai memudar yang berakibat pada perpecahan yang amat menyakitkan yang pada akhirnya Masyumi bukan lagi menjadi satu-satunya partai Islam yang ada.

Pengacuan terhadap nilai-nilai demokrasi Barat telah membuat Masyumi melepaskan diri dari budaya Islam internasional, yakni menjauhkan diri dari norma agama. Masyumi berperan mengembangkan suatu bentuk sekularisasi politik. Beberapa alasan untuk menjelaskan hal tersebut yaitu: pertama terletak pada ciri periferis Islam Indonesia yang secara umum berwajah lebih heterodoks dibandingkan wajah Islam di dunia Arab. Alasan kedua adalah adanya evolusi Masyumi kearah demokrasi Islam adalah sikap menghadapi pengaruh Barat, yang menempatkannya di luar garis pemikiran aliran-aliran islamis sezamannya.

²⁴⁷ Pierre Rondo, *Les Partis Dans le Monde musulman (partai-partai Islam di dunia Islam)*, (Pouvoirs, 12, 1979), hlm. 71-79

Negara Islam yang menjadi tuntutan dalam Majelis Konstituante bukanlah menjadi tuntutan, namun sebuah substansi masyarakat dan Negara untuk menghayati ajaran Islam. Tuntutan tersebut tercermin dengan adanya upaya menetapkan kembali Piagam Jakarta. Konsep Negara Islam tidak dimaksudkan untuk tidak merangkul dan melindungi hak-hak golongan lain dalam hal-hal yang berhubungan dengan agama. Akan tetapi, memberikan hak-hak yang sama dalam melakukan segala aktifitas kehidupan sosial keagamaan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Itu sebabnya Piagam Jakarta dengan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” dijadikan sebagai alternatif bagi tuntutan golongan Islam dalam Majelis Konstituante dijadikan sebagai dasar negara.

Dalam hal menegakkan hukum, tampaknya Masyumi tidak ada sikap kompromi. Masyumi dengan sangat mudah mengemukakan kecaman terhadap presiden bila presiden bertindak berlawanan dengan hukum. Dalam bidang ekonomi kecenderungan Masyumi mengarah pada pemerataan, baik kesempatan maupun pendapatan. Pembinaan pengusaha pribumi, penguasaan usaha vital yang menyangkut orang banyak oleh negara, penggalakan koperasi, pembelaan terhadap buruh dengan upah minimum serta bantuan sosial bagi pekerja dan sebagainya. Persoalan yang berkaitan dengan ketentuan Islam dalam bidang ini, seperti soal pengumpulan zakat, bunga bank, asuransi, dalam hubungan dengan kehidupan Negara tampaknya belum sempat dibahas oleh tokoh-tokoh Islam (Masyumi).

Dengan begitu cita-cita Negara Islam dapat diwujudkan sebagai perilaku kehidupan bermasyarakat dalam Negara Republik Indonesia. upaya memperjuangkan Negara Islam oleh Partai Masyumi, seringkali dihadapkan dengan berbagai persoalan baik di internal maupun eksternal. Keberagaman tersebut terlihat adanya persatuan untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu memperjuangkan Islam sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Adanya keinginan untuk terlibat dalam politik kekuasaan untuk menentukan siapa-siapa yang akan duduk dalam jabatan parlemen telah memberikan jalan pilihan beberapa golongan Islam untuk keluar dari Masyumi. Sehingga persatuan yang menjadi ikrar bersama pada November 1945 tidak bisa bertahan untuk memperjuangkan cita-cita islam.

B. Saran

Dalam kajian ini, penulis menjelaskan situasi religious intelektual ummat Islam Indonesia dalam percaturan politik kenegaraan di pentas nasional, sejarah telah mencatat bahwa keterlibatan tokoh-tokoh Islam dalam masalah-masalah politik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, telah memberikan sumbangan besar dalam pembentukan karakter kebangsaan serta nasionalisme. Harus diakui bahwa dalam kajian ini masih jauh dari keterbatasan mengingat tema yang dibahas hanya terbatas pada tindakan bersama Partai Masyumi dalam upaya mendirikan Negara Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Alfian, Ibrahim. *Sejarah dan permasalahan masa kini*. pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Sastra Universitas gajah Mada, Yogyakarta: Universitas gajah Mada, 1985.
- Bakker, Chris. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. terj. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Beilharz, Peter. *Teori-Teori Sosial; Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Berger, Peter, L. dan Thomas Luchmann. *Social Construction of Reality*. New York: Dobbleday, 1967
- Boland, B. J. *Pergolakan Islam di Indonesia*. Jakarta: P.T. Grafiti Pers, 1985.
- Feit, Herbert, dan Lance Castle. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: P.T. LPES, 1988.
- Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Hamdi (al-), Ridho. *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013
- Djaelani, Abdul Qadir. *Perjuangan Ideologi Islam di Indonesia*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta, Gramedia, 1993
- Luckmann, Thomas. *Das Problem der Religion in der Modernen Gesselschaft*. Brisgau: Verslag Rombach, 1963.
- Madinier, Remy. *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*. terj. Jakarta: Mizan dengan Forun Jakarta Paris, 2013

- Mahendra, Yusril Ihza. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam; Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-Islami (Pakistan)*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Mangkusasmito, Prawoto. *Memperingati Enam Tahun Masyumi*. Jakarta: P.T. Hikmah, 1951
- Marihandono, Djoko. *Titik Balik Historiografi di Indonesia*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2008
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- . *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan, 2009.
- . *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 2006
- Mintorejo, Syafa'at. *Islam dan Politik Islam dan Negara di Indonesia*. Jakarta: 1973.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam 1965-1987: Dalam Perspektif Sosiologis*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Muttaqin, Jajang. *Masyumi dalam Pergolakan Politik Islam Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2004
- Nata, Abdullah, dan Azra, Azyumardi. *Problematika Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo bekerja sama dengan UIN Jakarta Press, 2000
- Natsir, Haedar. *Islam Syariat; Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2013.
- Noer, Deliar. *Mengapa Partai Islam Kalah: Perjalanan Politik Islam dari Pra Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden*. Jakarta: ALVABET, 1999.
- . *Partai Islam di Pentas Nasional, 1945-1965*. Jakarta: P.T. Temprint, 1987.
- Parson, Talcot. *The Social System*. New York: Free Press. 1951
- Ramli, Lily. *Islam Yes Partai Islam Yes*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik, 2004

- Ridwan, Nur Khalik. *NU & Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik Dan Kekuasaan*. Jakarta: Ar-Ruzzmedia, 2010
- Ricklefs, M. C. *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008*. Jakarta: Serambi, 2010
- . *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai sekarang*. Jakarta: Serambi, 2013
- Salim, Arskal. *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara*. Jakarta: JPPR, 1999.
- Samsuri. *Politik Islam Anti Komunis*. Yogyakarta, P.T. Safira Insani Press, 2004
- Siregar, Insan Fahmi. *Partai Masyumi Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2014
- Sitompul, Agusssalim. *Usaha-Usaha Mendirikan Negara Islam dan Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Misaka Galiza, 2008
- Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2007.
- Soekarno. *Menemukan Kembali Revolusi Kita*. Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1960.
- Soekanto, Soerjono & Ratih Lestarini. *Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1988
- Syaifuddin Anshari, Endang. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Jakarta: Rajawali, 1996.
- Syamsuddin, M. Din. *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos, 2001.
- Syafii Maarif, Ahmad. *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung, Mizan dan Maarif Institut, 2009
- . *Islam dan Nilai-Nilai Universal*. Jakarta: International Center For Islam and Pluralisme ICIP, 2008
- . *Islam dan Politik Indonesia Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- . *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: P.T. Pustaka LP3ES, 2006
- Syahrasad, Herdi. *Islamisme Nasionalisme Globalisme: Jejak-Jejak Ideologi Terkoyak*. Jakarta: PT. Melibas, 2005

Turnan Kahin, George Mc. *Nationalism and revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1972

Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*. di sunting dan diterjemahkan oleh A.M. Henderson dan Talcott Parsons. New York: Oxford University Press, 1947.

Tesis/Disertasi :

Abdurrahman, Dudung. *Gerakan Sosial-Politik Kaum Tarekat di Periangan Pada Abad XX*. Sebuah disertasi

Siregar, Insan Fahmi. *Partai Masyumi; Pembentukan, Perkembangan, dan Pembubarannya 1945-1960*. Tesis: Universitas Indonesia.

R, Zainal Abidin. *Partai Politik Islam Era Reformasi (Studi Tentang Politik Pragmatis PPP, PBB, dan PKS)*. Disertasi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

Artikel/Jurnal/Majalah/Surat Kabar:

“Mengapa Tidak Negara Islam” Forum Keadilan, edisi No. 39, 31 Desember 2000.

“Siapa Mau Syariat Islam” Majalah Tempo Edisi No. 36/XXX/5, 11 November 2001.

“Perjalanan Politik Muhammadiyah dari Ahmad Dahlan hingga Syafii Maarif” Jurnal Pemikiran Agama dan Peradaban/TANWIR, edisi Perdana, Vol. 1. Mei 2003.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : **Jainuddin**
Tempat/Tanggal Lahir : Tenga, 05 Januari 1983
Alamat : Desa Samili Kec. Woha Kabupaten Bima.
No. Hp. : 085253436210
Email : [jainuddin.ptais015@gmail.com/](mailto:jainuddin.ptais015@gmail.com)
zen.altenga@gmail.com
Nama Ayah : H. Tajudin
Nama Ibu : Imran
Nama Istri : Sarifah
Nama Anak : Fawaid Izzuddin

B. Riwayat Pendidikan

SD Inpres Tenga	Lulus	1995
SMP 1 Woha	Lulus	1998
SMA 1 Woha	Lulus	2001
S1 STAI Muhammadiyah Bima	Lulus	2012

C. Riwayat Pekerjaan

1. Staf BAAK STAI Muhammadiyah Bima
2. KPPS KPU Desa Tenga Tahun 2005-2010

D. Penghargaan

Lulusan Terbaik Jurusan Pendidikan Agama Islam STAI Muhammadiyah Bima Tahun 2012

E. Pengalaman Berorganisasi

1. Pimpinan Caban IMM cabang Bima (2011-2012)
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bima (2012-2015)
3. BKPRMI Desa Tenga (2010-2015)
4. Karang Taruna Desa Tenga (2008-2012)
5. Majelis Kader PDM Kabupaten Bima (Sekarang)

Yogyakarta, Juli 2016

Penulis,



Jainuddin